

BAB IV

PROTEST VOTING DAN GERAKAN KOTAK KOSONG: ANALISIS

AKSI PROTES JARINGAN KOTAK KOSONG (JKK)

Sejak tahun 2005, Indonesia telah menerapkan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung. Langkah ini merupakan upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi di tingkat lokal dan menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Dalam praktiknya, rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan pemimpin dan masa depan daerah mereka sendiri. Awalnya, Pemilukada dilakukan secara terpisah di setiap daerah sesuai dengan jadwal periode kepemimpinan kepala daerah. Namun, pada tahun 2015 Pemilukada dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan, terdapat perkembangan politik yang baru yaitu munculnya fenomena calon tunggal yang menimbulkan lahirnya kotak kosong. Tren Pemilukada dengan calon tunggal terus mengalami peningkatan dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 yang meningkat menjadi 25 daerah dan salah satunya adalah Kota Balikpapan. Hadirnya kotak kosong dalam Pemilukada Kota Balikpapan menciptakan berbagai gerakan untuk merespon fenomena tersebut, salah satu gerakan yang terbentuk adalah Jaringan Kotak Kosong (JKK).

Kebijakan partai politik yang cenderung sentralistis dan mengabaikan suara dari arus bawah berdampak pada praktik politik transaksional yang merajalela dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah (Gunawan, 2018). Dalam hal ini, terciptanya calon tunggal tak lepas dari adanya kekuatan kapital dari *incumbent* yang memberikan mahar sebagai imbalan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa

politik transaksional telah mengakar dalam sistem politik, yang mana calon harus membayar "uang politik" agar dapat mendapatkan dukungan partai politik.

Dalam fenomena gerakan mendukung kotak kosong, umumnya penelitian terdahulu hanya membahas dari teori gerakan sosial, namun dalam penelitian ini menggabungkan teori gerakan sosial dan *protest voting* dalam konteks elektoral. Dilakukan berdasarkan gap penelitian sebelumnya yang belum membahas isu dan variabel dari gerakan sosial terkait *protest voting*. Penelitian ini menyoroti fokus utama kedua teori tersebut, yaitu aksi protes dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik yang ada. Gerakan kotak kosong dianggap sebagai bentuk gerakan sosial yang mana para aktor ingin menciptakan perubahan politik dengan memilih opsi kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik saat itu. Dengan menggunakan hak suara mereka sebagai bentuk protes melalui tindakan *protest voting* dengan memilih kotak kosong sebagai simbol ketidakpuasan.

Kurangnya kepercayaan politik dan meningkatnya rasa keterasingan dapat menimbulkan perilaku protes yang aktif. Selain itu, perilaku protes dan keterlibatan dari masyarakat dalam aksi protes inheren dengan rasa ketidakpercayaan politik terhadap pemerintah yang ada (Pierce & Converse, 1989). Kendati demikian, rasa ketidakpercayaan tersebut tetap ditularkan melalui mekanisme pemilu, bukan melalui cara-cara kekerasan atau melalui protes jalanan yang bersifat anarki (Muller et al., 1982). Ketidakpercayaan politik (*political distrust*) terhadap pemerintah dan sistem politik telah mendorong Suriansyah membentuk JKK untuk terlibat dalam aksi protes. Suriansyah merasa bahwa calon yang ada tidak memadai dan tidak memperhatikan kepentingan publik secara menyeluruh. Perilaku protes dengan

menggunakan kotak kosong dianggap sebagai simbol protes dan cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang dianggap kurang demokratis, dengan memilih menyalurkan rasa ketidakpercayaan politik tersebut melalui mekanisme yang ada, yaitu melakukan tindakan *protest voting* dengan mencoblos kotak kosong pada surat suara.

JKK dapat diartikan sebagai bentuk protes yang kuat dan jelas dari masyarakat atas ketidakpuasan mereka terhadap proses politik dan pilihan kandidat yang terbatas. Munculnya calon tunggal menjadi pemicu utama terbentuknya jaringan ini. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, JKK menjadi saluran ekspresi bagi masyarakat yang merasa bahwa hak demokratis mereka untuk memilih secara bebas terbatas. Dalam konteks elektoral, JKK mencerminkan suara kolektif yang menolak dominasi calon tunggal dan mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pembatasan dalam pilihan politik. Keputusan untuk memilih kotak kosong dianggap sebagai tindakan konkret untuk menentang sistem yang dianggap tidak adil dan tidak demokratis. JKK tidak hanya menjadi wadah untuk menyatukan masyarakat yang memiliki pandangan serupa, tetapi juga sebagai alat untuk mengartikulasikan aspirasi keberagaman opsi politik yang lebih besar.

Mendukung kotak kosong bukan hanya sekadar tindakan partisipasi politik, tetapi juga merupakan ekspresi kritis dan konstruktif dari masyarakat yang menghargai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam esensinya, gerakan ini menandai dorongan untuk mewujudkan perubahan positif dalam proses politik, terutama dalam situasi yang mana masyarakat merasa terbatas dalam pilihan

kandidat. Dengan mendukung kotak kosong, mereka secara aktif menunjukkan ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia dan mengadvokasi untuk pembaharuan yang lebih baik. Gerakan ini mencerminkan kesadaran akan hak-hak demokratis dan tanggung jawab untuk turut serta dalam membentuk masa depan politik mereka. Lebih dari sekadar mengekspresikan ketidakpuasan, gerakan mendukung kotak kosong juga bersifat konstruktif karena mencoba memperkenalkan alternatif yang lebih demokratis. Dengan berfokus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan, JKK berupaya memberikan opsi yang lebih luas dan beragam, menciptakan panggung untuk berbicara dan menyuarakan keinginan mereka. Gerakan ini mendorong pemikiran kritis, dialog terbuka, dan pertukaran ide yang dapat membentuk perubahan positif dalam sistem politik lokal.

Dalam memanfaatkan kesempatan politik yang ada, Suriansyah secara proaktif dan strategis mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan politik mereka. Suriansyah menyadari bahwa tindakan *protest voting* merupakan cara yang efektif dalam mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sistem politik dan elite politik. Oleh karena itu, Suriansyah dan JKK menggunakan kesempatan politik ini untuk meningkatkan visibilitas dan mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk gerakan mereka. Dengan memanfaatkan berbagai platform-media, dan pertemuan publik untuk menyebarkan pesan mereka tentang pentingnya memilih kotak kosong, serta mengadakan pendidikan politik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kotak kosong dan manfaatnya terhadap tumbuh kembangnya demokrasi.

Dengan melakukan mobilisasi untuk meningkatkan sumber daya, Suriansyah selaku Ketua Umum JKK berusaha untuk memperkuat gerakan dalam mencapai tujuan politik diinginkan. Suriansyah menyadari bahwa untuk efektif dalam memengaruhi perubahan politik, mereka perlu memiliki sumber daya yang memadai. JKK melakukan upaya untuk mengumpulkan dukungan finansial dan memanfaatkan jaringan non formal dari berbagai kemitraan dengan tokoh masyarakat, elite politik, organisasi dan para individu yang memiliki visi politik serupa, yang dapat memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya. Dengan merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi pemuda, partai politik, elit politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, JKK mengambil peran sebagai gerakan protes yang inklusif.

Melalui strategi mobilisasi dan organisasi, JKK menciptakan bentuk protes yang terkoordinasi dan signifikan, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui proses yang demokratis. Dengan demikian, JKK memaknai dirinya sebagai sarana yang efektif untuk menggalang opini publik dan mengekspresikan penolakan terhadap pembatasan demokrasi dalam pemilihan lokal. Partisipasi politik yang kritis terlihat dalam upaya masyarakat untuk mengevaluasi dan menantang status quo yang dianggap tidak memadai atau tidak adil.

Dalam pembingkaiannya mereka, Suriansyah dan JKK berfokus pada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami alasan di balik gerakan memilih kotak kosong. Melalui pendekatan ini, berusaha untuk menghilangkan keraguan dan kebingungan yang mungkin ada di kalangan masyarakat, serta

memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep demokrasi. Dengan memberikan pemahaman ini kepada masyarakat, JKK berharap dapat mengubah persepsi negatif atau skeptisisme yang mungkin ada terhadap gerakan memilih kotak kosong. JKK ingin memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa memilih kotak kosong adalah sebuah alternatif yang sah dan memiliki dampak positif dalam mendorong keberagaman politik, mengingatkan para pemimpin untuk memperhatikan aspirasi rakyat, serta mendorong adanya persaingan yang sehat dalam proses pemilihan.

Merujuk pada tiga indikator dari teori gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini, terlihat bahwa Suriansyah dan para anggota dari JKK lebih dominan memanfaatkan sumber daya mereka untuk melakukan mobilisasi massa. Sebagai salah satu tokoh masyarakat yang cukup dikenal di Kota Balikpapan, Suriansyah memiliki kedekatan dan keterhubungan dengan berbagai kelompok dan individu di kalangan masyarakat. Dengan begitu, Suriansyah mampu memanfaatkan relasi tersebut untuk mengajak masyarakat yang memiliki visi yang sama untuk bergabung dalam gerakan kotak kosong.

Selain sumber daya relasional, Suriansyah dan JKK mampu memanfaatkan sumber daya lainnya, seperti teknologi komunikasi dan media sosial, dengan memanfaatkan platform-platform ini untuk menyebarkan pesan gerakan, menginformasikan tujuan dan tuntutan gerakan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Suriansyah dan JKK lebih condong kepada memobilisasi massa, agar mendapatkan dukungan yang luas. Dengan menggabungkan kekuatan sumber

daya relasional, reputasi, dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan gerakan demi memperjuangkan perubahan politik melalui aksi-aksi kolektif yang terorganisir dengan baik.

Kendati demikian, JKK Balikpapan yang menggunakan istilah jaringan, namun dalam implementasinya jaringan yang dimiliki sangat terbatas. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat bahwa JKK Balikpapan hanya terdiri dari satu kelompok yang tergabung ke dalam salah satu Ormas. Dalam konteks ini, penting untuk menggarisbawahi bahwa JKK Balikpapan telah membatasi efektivitas dari gerakan protes itu sendiri. Padahal, dengan memiliki jaringan yang lebih luas, gerakan protes akan memiliki lebih banyak sumber daya, dukungan, dan pengaruh yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.

Di samping itu, munculnya gerakan lain dengan kepentingan yang sama tetapi bukan bagian dari JKK. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan atau ketidakselarasan antara berbagai kelompok atau individu yang memiliki tujuan yang sama, jika kelompok-kelompok ini dapat bergabung dan bekerja sama dengan membentuk suatu jaringan yang lebih luas, mereka dapat meningkatkan koordinasi, saling mendukung, dan memperkuat pengaruh mereka secara keseluruhan. Penting untuk menekankan bahwa JKK Balikpapan yang tidak berjejaring atau saling terhubung ini menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dari gerakan protes yang dilakukan.